

DataDesa.co.id; Cara Akuntan Muda Mulai Berkontribusi Untuk Negara

Acep Kholid Kusaeni; Hisyam Abdussalam; Benediktus Pinasthika

PPM School of Managemet

Pengantar

Kemajuan dari sebuah Negara salah satunya ditentukan oleh kemajuan Desa. Dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Dalam hal ini bahwa Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Desa, hal tersebut memperkuat kewenangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan untuk menunjang kemajuan dalam Desa, salah satunya adalah Dana Desa dari APBN.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, adanya Dana Desa ini bertujuan bahwa setiap Desa dapat meningkatkan pelayanan publik di desa, menekan angka kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta dapat memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Program Dana Desa adalah sebuah kebijakan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendesentralisasikan pertumbuhan ekonomi, “Terbangunnya ribuan kilometer jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya yang memberikan dampak adalah buah kepemimpinan serta kerja keras bupati, wali kota, dan kepala desa. Begitu juga dengan penyerapan Dana Desa meningkat dari 83% menjadi 99%. Kepala daerah telah membuktikan bias mencetak sejarah baru.” Ujar Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo. (Merdeka.com, 2018).

Desa Pongkok adalah salah satu bentuk sukses dari program Dana Desa, hal tersebut dapat dilihat dari anggaran Pendapatan Desa yang sebesar Rp3,73 miliar yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp657 juta, Pendapatan Transfer sebesar Rp1,50 miliar, dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp1,52 miliar. Sedangkan untuk Belanja Desa dianggarkan sebesar Rp2,15 miliar digunakan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah salah satunya digunakan untuk pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), tugas dari BUM Desa ini adalah mengelola potensi-potensi sumber daya alam yang terdapat di Desa Pongkok sebagai lading penghasilan bagi masyarakat.

Berbeda halnya dengan program Dana Desa yang disalurkan kepada desa di Kabupaten Tolikara. Polda Papua mengatakan sebanyak Rp302 miliar Dana Desa di Kabupaten Tolikara dikorupsi, “Memang benar dari hasil pemeriksaan BPK terungkap kerugian Negara mencapai Rp302 miliar,” kata Direktur Reskrimus Polda Papua Kombes Polisis Edi Swasono. Beliau mengatakan, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terjadi jumlah kerugian karena seluruh dana tidak bias dipertanggungjawabkan. (tirta.id, 2018)

Perbandingan dari kedua desa tersebut dapat dilihat, bahwa dengan adanya program Dana Desa tidak menutup kemungkinan adanya potensi kecurangan (*fraud*) didalamnya. Pada umumnya kecurangan (*fraud*) akan selalu terjadi ketika tidak adanya pencegahan dan pendeteksian sebelumnya. Oleh karena itu, terdapat beberapa cara dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi seperti Segiempat kecurangan (*fraud diamond*). Cressey (1953) dalam skousen *et al.* (2008) mengemukakan tiga kondisi berupa kerangka untuk mengidentifikasi factor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya tindakan kecurangan yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi) yang disebut sebagai *fraud triangle*. Selanjutnya Wolfe dan Hermanson (2014) menambahkan tiga kondisi yang telah dikemukakan oleh Cressey (1953) dalam Skousen *et al.* (2008) dengan *capability* (kemampuan), sehingga empat kondisi tersebut dinamakan *fraud diamond*.

Indonesia Corruption Watch (2017) melihat bahwa korupsi di desa, utamanya menyangkut anggaran desa, meruakan salah satu masalah mendasar. Hal tersebut hadir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, serta keuangan desa. Berdasarkan hasil pemantauan ICW atas korupsi yang terjadi di desa, pada tahun 2015 – 2017 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus korupsi telah mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Terjadi

kenaikan yang signifikan menjadi dua kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus.

Tidak semua dari 154 kasus korupsi di sektor desa merupakan korupsi anggaran. Namun, jumlah kasus dengan objek anggaran desa mencapai 127 kasus, sedangkan 27 kasus lainnya merupakan objek non-anggaran desa atau total 185 dari jumlah kasus. Kemudian dari aspek kerugian Negara, korupsi di desa turut menimbulkan kerugian dalam jumlah besar. Pada tahun 2015 kerugian Negara mencapai Rp. 9,12 miliar. Pada tahun 2016, kerugian mencapai Rp. 8,33 miliar. Sementara pada tahun 2017, kerugian negara mencapai Rp. 30,11 miliar.

Adapun hal yang dapat dilakukan dengan mengurangi potensi fraud dalam anggaran desa, salah satunya dengan melibatkan peran akuntan muda didalamnya. Akuntan muda adalah generasi calon akuntan profesional yang masih menimba pendidikan di perkuliahan atau disebut juga sebagai mahasiswa jurusan akuntansi.

Akuntan muda tentunya memiliki peran dan andil dalam perlindungan kepentingan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk program pemerintah seperti Dana Desa. Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah yang sebenarnya memiliki dampak yang luas bagi kesejahteraan masyarakat yang sudah diatur melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diturunkan dalam dua peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Menurut Gerrit J. Gonschorek dan Günther G. Schulze¹, Dana Desa (*village fund*) memiliki tujuan untuk mendorong efektivitas program pembangunan pedesaan nasional. Namun terdapat masalah seperti yang dijelaskan pada bagian perumusan masalah, bahwa akuntan bisa menjadi instrumen untuk menjadi penjaga akuntabilitas pelayanan publik.

Dalam roadmap Dana Desa 2015-2019, dapat dilihat bahwa ada peningkatan jumlah anggaran yang dikucurkan bagi desa. Dari Rp.20,77 triliun pada 2015 hingga Rp.111,84 triliun pada 2019 yang bersumber dari APBN. Sementara untuk tahun 2018 ini, dana yang dikucurkan adalah sebesar Rp.103,79 triliun dengan rata-rata 1.400,8 juta perdesa untuk

¹ Gonschorek, Gerrit J. dan Günther G. Schulze. 2018. *Continuity or Change? Indonesia's Intergovernmental Fiscal Transfer System under Jokowi*. ProQuest : Journal of Southeast Asian Economies Vol. 35, No. 2 (2018), pp. 143–64

74.910 desa². Bila ditelaah lebih jauh, Dana Desa memiliki implikasi yang beragam bila



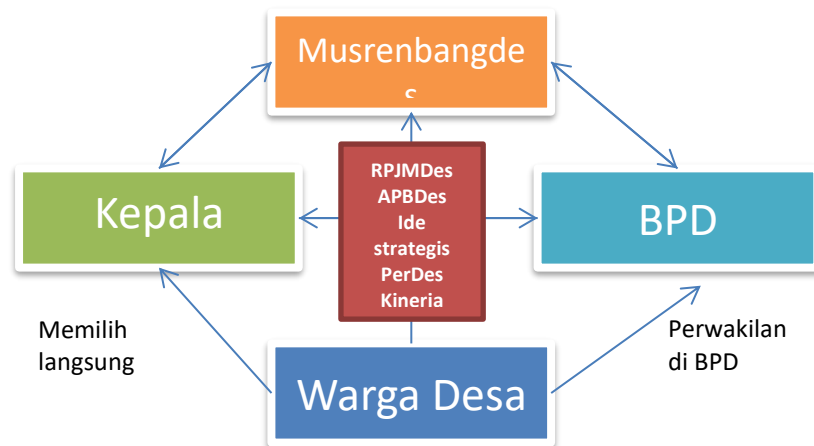
dilihat dari perspektif normatif. Perputaran uang menjadi lebih cepat yang ditandai dengan partisipasi masyarakat yang aktif serta distribusi pertumbuhan menjadi merata. Di sisi lain, keragaman dari desa itu sendiri mempengaruhi efektivitas pembangunan.

Figur 1 Penerima Dana Desa. Sumber: Kementerian Keuangan RI 2016

Sistem yang dibangun oleh pemerintah sebenarnya sudah baik dan aman karena pengelolaan Dana Desa³ itu sendiri dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

² Buku Pintar Dana Desa 2018

³ Ibid



Figur 2. Proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa. Sumber : diolah

a. Perencanaan

Penyaluran Dana Desa dibagi menjadi dua tahapan yaitu 60% untuk tahap pertama dari pagu Dana Desa di bulan Maret-Juli dan 40% untuk tahap kedua dari pagu Dana Desa di bulan Agustus.

Sesudah penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota yang selanjutnya diteruskan ke Desa maka tanggungjawab perencanaan sudah berada di tangan desa. Pengelolaannya nanti pun memiliki azas transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Murenbangdes) Tahun 2018 yang melibatkan warga desa termasuk dari kelompok kepentingan khusus (lansia, kaum difabel, perempuan dan anak-anak. Musyawarah tersebut harus memiliki prinsip partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, Kepala Desa berserta perangkatnya untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) yang menjadi dasar untuk pembuatan Anggaran Pembelanjaan Desa (APBDes). Di dalamnya juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu perwakilan warga desa yang dipilih secara demokratis untuk berkoordinasi langsung dengan Kepala Desa.

b. Pelaksanaan

Setelah direncanakan, pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang perlu diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan langsung oleh Kepala Desa. Pembayaran dapat dilakukan bila ada Surat

Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi.

c. Penatausahaan

Pencatatan transaksi dari penerimaan dan pengeluaran oleh Bendahara Desa setiap akhir bulan secara tertib melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Kepala Desa maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan realisasi pelaksanaan APBDes ke Bupati/Walikota melalui Camat di Semester I dan Semester II.

e. Pertanggungjawaban keuangan desa

Melalui tiga lampiran yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember, dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Perumusan Masalah

Tingginya nominal Dana Desa melahirkan potensi-potensi masalah baru yang tentunya akan merugikan negara. Seperti dikemukakan selanjutnya, bahwa kasus korupsi dan *fraud* lainnya sudah mencapai 30.11 Miliar Rupiah kerugian negara akibat kurangnya akuntabilitas dan pengawalan Dana Desa. Namun kerugian itu nampaknya tidak menjadikan anggaran Desa menjadi menurun. Menurut model yang seperti dikemukakan sebelumnya, rincian anggaran Desa pemerintahan presiden Joko Widodo terus meningkat. Belum ada pengendalian yang konkrit dan juga partisipasi masyarakat yang aktif untuk mengawal desa ini. Oleh karena itu, masalah pertama adalah bahwasannya dari tahun ke tahun Dana Desa meningkat dan menimbulkan potensi *fraud*/ kemungkinan disalahgunakan lebih besar dari periode sebelumnya sehingga dibutuhkan peran aktif dan pengendalian untuk itu.

Selanjutnya, adalah kurangnya partisipasi dari Akuntan Muda di Institusi pemerintahan. Hal ini berdampak bahwa kurangnya partisipasi dari publik untuk mengawal Dana Desa sehinggaantisipasi lebih kurang dilakukan dibanding deteksinya. Tak heran jika korupsi dan penyalahgunaan Dana Desa membuat negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Potensi Akuntan Muda sangat besar yang berarti akan berpengaruh lebih besar untuk peningkatan

ekonomi yang dimulai dari Desa. Hal ini menjadi suatu masalah tersendiri karena pengawalan dapat dimulai dari publik yang bisa mengerti akan Dana Desa sendiri.

Masalah selanjutnya adalah belum adanya laporan-laporan yang terintegrasi akan keterkaitan terhadap Dana Desa itu sendiri. Saat ini, sifat apatisme masyarakat dimulai dari kurangnya keinginan untuk menggali informasi terkait Dana Desa. Mekanisme laporan Desa di setiap daerah bermacam-macam sehingga terkesan susah untuk ditelaah lebih lanjut oleh masyarakat pada umumnya.

Maka dapat disimpulkan bahwasannya ada tiga permasalahan utama yang penulis garis bawahi; 1) Dana Desa setiap periode mengalami peningkatan sehingga melahirkan potensi *Fraud* yang besar disaat pengendalian dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal 2) kurangnya peranan dan kontribusi Akuntan Muda untuk bergerak membantu institusi pemerintahan, dan 3) Belum tersedianya platform untuk mewadahi laporan-laporan yang terintegrasi terkait Dana Desa sehingga mengakibatkan rasa apatisme terhadap masyarakat ketika dianjurkan untuk mengawal Dana Desa.

Pembahasan

DataDesa.co.id

Situs tersebut menjadi wadah bagi akuntan muda untuk mengawal pengelolaan Dana Desa dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dari Kepala Desa. Dalam hal ini akuntan muda berperan untuk mengelola *database* desa secara nasional. Dengan memanfaatkan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 ini, akuntan muda bisa turut ambil bagian dalam pengawalan Dana Desa tersebut.

1. Mengawal Dana Desa dengan DataDesa.co.id

Datadesa adalah sebuah platform yang mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang dipersiapkan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan oleh instansi tertentu perihal penggunaan, pengalokasian, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Terdapat 3 Institusi pemerintah yang berada dalam mekanisme dan penyaluran Dana Desa sedari 2015 yang lalu yakni Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan- Kementerian Keuangan, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Situs ini juga nantinya diharapkan bisa langsung tersinkronisasi dengan sistem Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) yang saat ini sudah diimplementasikan oleh BPKP sejak 2015.

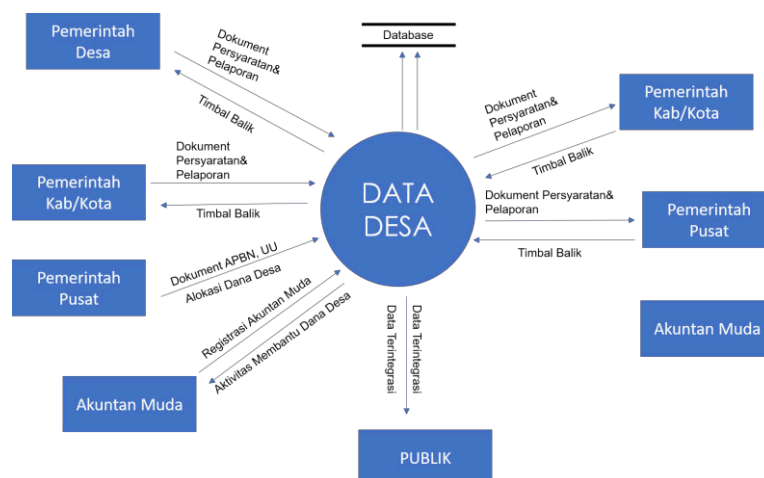


Figur 3- Sinkronisasi SisKeuDes dan Datadesa

Tiga institusi itu merumuskan peraturan dan implementasi penyampaian serta pelaporan terkait Dana Desa beserta keterserapannya. Datadesa menjadi platform untuk ketiga institusi itu melaporkan seluruh dokumen, dari mulai peraturan sampai pelaporan yang benar-benar terjadi terkait Dana Desa sehingga memudahkan masyarakat umum mengawal, melihat, dan mengakses seluruh data sehingga transparansi dan partisipasi dapat tercapai dan kebijakan Dana Desa bisa tepat sasaran.

Datadesa juga menjadi platform untuk menyediakan ruang untuk para Akuntan Muda untuk senantiasa mulai memecahkan masalah sosial, salah satunya dengan membantu memaksimalkan kemampuan desa dengan manajemen dan asistensi pelaporan Dana Desa yang memungkinkan dimulai dari SisKeuDes tersebut. Sehingga, Akuntan muda dapat secara konkrit memecahkan masalah dan mengawal Dana Desa untuk kemaslahatan khalayak umum.

Secara garis besar, datadesa dapat diilustrasikan menggunakan DFD dibawah ini.



Figur 4. Data Flow Diagram-Illustrasi Penulis

Setiap laporan yang diunggah baik dari Pemerintah Pusat, Daerah Kabupaten atau Kota, dan Desa akan membantu untuk menerapkan sistem “*check and balance*” diantara ketiga institusi tersebut. Misalnya, Pemerintah Kabupaten melaporkan Undang-undang dan peraturan ke datadesa. Hal yang sama akan membuat Pemerintah Pusat mengetahui bahwa Pemerintah Daerah sudah memenuhi syarat untuk Dana Desa mengingat UU dan peraturan merupakan syarat umum untuk pencairan Dana Desa. Seluruh data akan menjadi data terbuka untuk umum dimana hal ini akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sekaligus meningkatkan peran Akuntan Muda untuk kesejahteraan masyarakat luas yang dimulai dari pengawalan dan asistensi Dana Desa.

Lampiran 1 menunjukkan bahwa di datadesa memuat menu 3 institusi yang berada dalam siklus Dana Desa beserta menu Akuntan Muda dan fitur Lapor apabila ada ditemukan indikasi penyalahgunaan atau fraud yang timbul bagi siapa saja pengunjung web data ini. 3 Insituti itu akan menyediakan sub-menu yang berisi tentang dokumen-dokumen pendukung Dana Desa, dimulai dari peraturan desa, alokasi Dana Desa, sampai pada program desa.

Secara keseluruhan, datadesa ini menyediakan data riil mengenai kondisi, anggaran, maupun dokumen pendukung lainnya tentang Dana Desa di Indonesia. Setiap individu dapat mengakses situs ini untuk mengetahui perkembangan dan berpartisipasi langsung terhadap pengawalan Dana Desa. Lampiran 2 dan Lampiran 3 menunjukkan bagaimana situs ini menyediakan seluruh data dari mulai Peraturan, Pelaporan, sampai Rencana anggaran Desa di periode tertentu.

Setiap dokumen pelaporan akan senantiasa terbaharui melalui situs ini. Ketika ada desa yang belum memenuhi pelaporan, mereka akan diberikan pilihan untuk mendapatkan asistensi dari Akuntan Muda yang dapat membantu pemerintah Desa untuk membuat pelaporan dan pertanggung jawaban.

Terdapat 4 tipe user yang menggunakan situs ini; ketika *user* melakukan login, maka mereka akan dihadapkan dengan tampilan pengguna yang selanjutnya disebut *Dashboard*. Ada pula fitur Lapor yang nantinya disediakan untuk masyarakat umum yang ingin melaporkan penemuan mencurigakan yang melawan hukum terkait Dana Desa. Fitur ini nantinya akan diarahkan ke situs lapor.go.id yang sudah ada sekarang.

➤ **Pemerintah Pusat**

Pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mengunggah seluruh data berkaitan dengan RAPBN dan APBN yang berbicara mengenai Dana, Informasi riil untuk informasi Alokasi Dana Desa perprovinsi, Peraturan Desa, Daftar Kabupaten.Kota untuk perihal pengecekan administrasi dan infografis. Lampiran 4 menggambarkan fitur-fitur yang ada di menu *Dashboard* Pemerintah Pusat.

Di Dashboard pemerintah pusat juga nanti akan ada data yang menunjukkan status persyaratan terkini dari beberapa daerah dan kabupaten untuk keperluan pencairan Dana Desa. Selain itu adapula informasi atau evaluasi Desa di daerah yang bermasalah sehingga menjadi fokus utama untuk mengatasinya.

➤ **Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota**

Mengingat mekanisme penyaluran Dana Desa menyentuh tahap penyaluran kepada Kepala Daerah, Bupati atau Walikota, maka pengguna yang kedua berasal dari pemerintah daerah. Lampiran 5 menggambarkan *Dashboard* Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaporkan RAPBD dan APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserata Peraturan Daerah dan Laporan yang berasal dari Desa di provinsinya masing-masing. Hal ini pula nanti akan menjadi syarat administratif untuk Desa dapat menikmati haknya untuk menerima kebijakan Dana Desa. Di akun Pemerintah daerah juga dapat mengevaluasi secara sistem, desa mana yang belum memenuhi persyaratan dan yang dikatakan bermasalah tertentu. Bahkan ada *Bar Chart* untuk melihat langsung gambaran akan laporan realisasi dan juga anggaran periode tersebut.

➤ **Pemerintah Desa**

Terciptanya Datadesa ini merupakan sebuah refleksi untuk dapat menurunkan potensi kejahatan Dana Desa dan membuat pemerintah Desa peduli akan transparansi dengan cara melaporkan laporan pemerintah Desa secara keuangan maupun non-keuangan untuk menggerakkan ekonomi pembangunan dari desa secara efektif dan transparan.

Pemerintah Desa dianjurkan untuk melaporkan seluruh laporan dimulai dari laporan realisasi sampai adanya laporan daftar pengadaan proyek desa yang menggunakan Dana Desa. Hal ini menuntut pemerintah desa untuk lebih bisa mengutilisasi aplikasi yang ada untuk pelaporan tersebut. SisKeuDes merupakan aplikasi pengelolaan desa saat ini. Aplikasi ini mendorong Desa untuk terus bisa melaporkan dan mempertanggungjawabkan anggarannya.

Maka dari itu, di *Dashboard* Pemerintah desa seperti terlampir di lampiran 6 dan Lampiran 7, akan ada satu fitur khusus untuk meminta bantuan kepada Akuntan Muda terkait pelaporan Dana Desa oleh pemerintah desa. Bantuan yang ditenggarai oleh Akuntan Muda ini mencakup luas dari mulai asistensi untuk pelaporan SisKeuDes sampai pengunggahan laporan ke Datadesa. Asistensi oleh Akuntan Muda merupakan sebuah bukti konkrit untuk Akuntan Muda berkontribusi terhadap kesuksesan penyelenggaraan negara, yakni dimulai dari desa.

Ketika mereka menekan tombol mengajukan bantuan, mereka akan diberikan tampilan mengenai siapa saja Akuntan Muda yang tersedia dan juga mengkomitmenkan dirinya untuk asistensi pembuatan desa. Pemerintah desa akan langsung menghubungi Akuntan Muda untuk asistensi didesa tujuan.

➤ **Akuntan Muda**

Peranan akuntan muda menjadi signifikan untuk proses pengawalan Dana Desa ini. Mereka dapat berpartisipasi dengan mendaftarkan diri ke situs ini. Pendaftaran ini juga nantinya akan meminta para calon Akuntan Muda untuk mengirimkan identitas singkat, membuat akun, dan mengunggah CV mereka kedalam situs. Nantinya mereka akan merespon dan menawarkan kesediaan untuk membantu kepada pemerintah desa seperti terlampir di Lampiran 8 dan Lampiran 9.

Akuntan Muda mempunyai *Dashboard* yang berisi kolum-kolum data yang membutuhkan bantuan para Akuntan tersebut. Dari mulai asistensi pembukuan, pelaporan dan juga pengelolaan teknologi. Para Akuntan Muda akan melihat desa mana saja yang membutuhkan bantuan lalu meresponnya dengan langsung menghubungi Pemerintah Desa Terkait seperti pada lampiran 9.1. Situs ini memberikan pengetahuan yang pasti terkait kondisi Dana Desa dilapangan. Ketika Akuntan Muda memutuskan untuk membantu, mereka langsung menemui yang bersangkutan baik melalui daring atau fisik untuk menyelesaikan asistensi tersebut.

Ketika satu asistensi sudah selesai, maka Akuntan Muda berhak mendapatkan poin tertentu untuk nantinya akan ditukar dengan kesempatan-kesempatan dan hadiah-hadiah yang prestis guna mengembangkan sayap menjadi Akuntan profesional. Penentuan penghargaan ini nantinya akan berbentuk pengembangan, tiket untuk pekerjaan magang di Institusi pemerintahan, atau beasiswa.

➤ Menu Infografis

Jika dicermati dari seluruh dashboard, setiap institusi diwajibkan untuk melaporkan infografik terkait Dana Desa di periode tertentu. Guna menginformasikan dengan menarik dan tidak bertele-tele, kami menganjurkan untuk semua institusi untuk dapat mengeluarkan infografik dari laporan terkait Dana Desa. Sehingga, seluruh masyarakat dapat melihat infografik melalui situs *datadesa* ini. Hal ini juga meningkatkan partisipasi masyarakat dimulai dari pengeluaran laporan yang menarik dan dapat membuat masyarakat mulai mencermati Dana Desa.

Jika pemerintah desa belum mempunyai sumber daya yang memadai untuk pembuatan infografis ini, maka PemDes dapat meminta bantuan di fitur “Ajukan Bantuan” yang nantinya sama akan direspon oleh Akuntan Muda yang bersedia. Penulis berharap bahwasannya sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengawal desa membuat peningkatan dimulai dari metode sosialisasi pelaporan kepada masyarakat yang menarik melalui infografik ini.

Peran Akuntan Muda

- Sebagai *data analysis* dalam pengelolaan Situs *DataDesa.co.id* (pre-assistance)
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *DataDesa.co.id* bisa menjadi *platform* bagi akuntan muda untuk menganalisis desa-desa yang memiliki potensi *fraud* yang besar. Tentu saja kemampuan untuk menganalisis laporan keuangan dimiliki oleh akuntan. *DataDesa.co.id* akan menciptakan sebuah *early warning system*, sehingga menjadi sarana bagi akuntan muda untuk melihat lebih jauh perkembangan desa-desa yang ada. Tidak hanya itu, akuntan muda juga dapat menelisik lebih dalam mengenai desa-desa yang sukses mengembangkan desanya setelah menggunakan Dana Desa. Hal ini bisa menjadi acuan bagi akuntan muda untuk menerapkan sistem yang baik dan mengadaptasikannya untuk desa-desa lainnya. Akuntan muda dapat memberikan masukan dan saran bagi Kepala Desa yang dirasa kinerjanya belum maksimal.
- Asistensi ke Desa (*assistance*)
Setelah menganalisis data yang terhimpun dalam satu *platform* *DataDesa.co.id*, akuntan muda bisa menemukan desa-desa yang dirasa kurang performanya dan terindikasi *fraud*. Dalam hal ini, akuntan muda akan terjun langsung ke lapangan sebagai bentuk tindak

lanjut atas analisis yang sudah dibuat. Bahwa apa yang dilakukan di desa adalah hasil rekomendasi dari DataDesa.co.id.

Siklus pengelolaan Dana Desa ini tidak lepas dari peran figur yang memiliki banyak peran⁴ fungsi instruksi, konsultasi, partisipasi, delegasi, dan pengendalian. Seperti dalam jurnal yang ditulis oleh Erni Hidayati (2016) bahwa fungsi dari pemimpin (lurah) yang dalam penelitian ini disebut sebagai Kepala Desa, sangatlah penting. Bilamana pemimpin dapat memberikan instruksi kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut serta dalam membangun desa maka masyarakat akan ikut berperan aktif. Pemimpin bisa menjadi *role model* dalam fungsi partisipasi. Sementara dalam fungsi konsultasi juga perlu dijalankan dalam membuat perencanaan penggunaan Dana Desa, dalam hal ini juga dapat melibatkan akuntan muda yang bisa menjadi *second opinion* bagi Kepala Desa untuk menentukan program apa yang ingin dicanangkan untuk desanya. Memang keputusan akhir berada di Kepala Desa, tapi akuntan muda bisa menjadi instrumen yang melengkapi perencanaan program yang dilihat dari perspektif akuntansi. Akuntan muda juga bisa menjadi alat bantu Kepala Desa dalam fungsi delegasi, dimana dalam pelaporan keuangan desa dapat dilakukan oleh akuntan. Begitu juga dengan fungsi pengendalian Kepala Desa bisa dibantu oleh akuntan muda.

Peran Akuntan Muda juga dapat membantu untuk mempersiapkan teknis pembukuan, pelaporan maupun pengelolaan dan pengaplikasian teknologi untuk pengendalian. Dalam hal ini, Pemerintah Desa saat ini sudah menggunakan aplikasi SisKeuDes untuk mengelola keuangan. Disini, Akuntan Muda berperan untuk memastikan semua desa terakomodir keinginannya dalam hal pengelolalan keuangan, dari mulai perencanaan sampai pelaporan.

- Tindak lanjut dari asistensi dengan pembuatan infografis sederhana (*post-assistance*)
Infografis menjadi penting karena bentuk transparansi dan akuntabilitas yang secara sederhana dan dapat dikomunikasikan kepada publik, terkhusus warga desa tersebut. Setelah adanya asistensi oleh akuntan muda, diharapkan adanya perubahan dalam pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya adalah mempublikasikan hasil kerja Kepala Desa dan perangkatnya dalam bentuk infografis. Akuntan muda dapat memberikan masukan, mana data laporan keuangan yang perlu ditampilkan agar mudah dipahami oleh awam.

⁴ Hidayati, Erni. 2016. *Fungsi Lurah Selaku Pemimpin dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Hijau Bersih dan Sehat (HBS) Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda*. Kalimantan : eJournal Administrasi Negara

Menghimpun Akuntan Muda

Seperti yang diketahui, bahwa akuntan muda memiliki hari peringatan pada 26 Oktober 2018 yaitu Hari Akuntan Muda Indonesia, yang diprakarsai oleh ICAEW Student Community Indonesia Chapter. Sebanyak 650 mahasiswa hadir dari 85 himpunan mahasiswa akuntansi di Universitas Kristen Krida Wacana untuk mengikrarkan juga bahwa akuntan muda Indonesia akan menjalani tugas dengan profesional, etis, dan demi bangsa yang lebih baik.

Proyek dengan *prototype* DataDesa.co.id dapat menjadi wadah bagi akuntan muda untuk mengabdikan pada bangsa dan negara sama seperti halnya Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang biasanya dilakukan di semester 6 atau 7. Namun KKN yang dilakukan adalah kegiatan lintas keilmuan dan lintas sektoral. DataDesa.co.id bisa menjadi sarana bagi akuntan muda untuk berbuat bagi masyarakat langsung dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuannya tentang akuntansi. Bermula dari *data analysis* dari DataDesa.co.id, turun ke lapangan untuk asistensi desa dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban, dan pembuatan infografis yang menampilkan laporan keuangan desa dan laporan pertanggungjawaban secara lebih sederhana.

Mahasiswa jurusan akuntansi yang tergabung dalam 85 himpunan tersebut menjadi target awal dalam proyek ini. Selanjutnya akan ada kerjasama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT). Mahasiswa jurusan akuntansi semester 6 atau 7 yang akan melakukan asistensi ke desa sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat. Kemenristekdikti bersama DataDesa.co.id akan menjadi titik awal berkumpulnya mahasiswa yang memiliki keprihatinan yang sama. Kemendes PDTT yang berkolaborasi dengan DataDesa.co.id akan menentukan desa-desa mana yang sekiranya butuh asistensi karena jumlah desa di Indonesia tidak bisa dibilang sedikit dan *platform* DataDesa.co.id akan menjadi pertemuan antara mahasiswa dan Kepala Desa.

Asistensi langsung ke desa menjadi pengalaman praktik nyata setelah belajar teori di dalam kelas. Ilmu yang sudah dipelajari bisa diaplikasikan secara langsung di lapangan. Di sisi lain, Kepala Desa dan desanya bisa terbantu untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di desa tersebut.

Bagi Akuntan Muda juga, mereka akan mendapatkan sistem poin yang nantinya dapat ditukarkan dengan manfaat-manfaat yang dapat menggali ilmu Akuntansi secara dalam. DataDesa.co.id mengusulkan poin bekerja sama dengan institusi terkait untuk kemungkinan kolaborasi meningkatkan kapabilitas sang Akuntan Muda untuk menghadapi dunia profesional yang berdampak lebih luas.

Kesimpulan

DataDesa.co.id menjadi kunci terciptanya sinergi antara Akuntan Muda dengan dukungan konkrit terhadap keberhasilan Dana Desa melalui sistem pelaporannya. Secara konseptual, situs ini dapat memberikan pengawasan dan pengendalian sekaligus mewadahi Akuntan Muda untuk berpartisipasi menyelenggarakan pemerintahan Desa yang efektif dan efisien.

Potensi tingkat *fraud* yang sangat tinggi membuat DataDesa.co.id menjadi wadah untuk pengendalian yang dilakukan masyarakat umum untuk terus melihat dan mengawasi keberlangsungan kebijakan Dana Desa. Tak hanya itu, situs ini dapat menjadi wadah untuk menggunakan tenaga Akuntan Muda untuk berkontribusi langsung atas penyelenggaraan Dana Desa.

Potensi *fraud* dapat menurun dengan adanya platform ini karena warga yang peduli dapat melihat proses, sampai daftar pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Tak hanya itu, sinkronisasi DataDesa.co.id dengan SisKeuDes yang dijalankan pemerintah langsung dapat menjadi pengendalian kuat untuk terus mengarahkan Pemerintah Desa yang beroperasi sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku. Sehingga antisipasi bisa lebih *intense* dilakukan ketimbang melakukan deteksi dan/atau kecurangan yang telah terjadi.

DataDesa.co.id juga menjadi wadah untuk Akuntan Muda mulai berkontribusi terhadap institusi pemerintahan. Hal ini dikarenakan fitur DataDesa.co.id membuat Akuntan Muda tahu Pemerintah Desa yang membutuhkan bantuan konkrit. Adanya DataDesa.co.id juga diharapkan menjadi jalan tengah terciptanya kepercayaan Pemerintah terhadap generasi muda yang ingin berkontribusi pada negara dan bangsa, khususnya dalam asistensi pelaporan terkait Dana Desa.

Bantuan dari Akuntan Muda asistensi dari mulai Pembukuan, Pelaporan, sampai penggunaan teknologi menjadi alat pendukung untuk mensukseskan kebijakan Dana Desa. Tak hanya itu,

pelaporan dalam bentuk infografis yang dibantu oleh Akuntan Muda menjadi cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat umum untuk mengawal Desa.

Selanjutnya, DataDesa.co.id menjadi platform untuk mewadahi laporan-laporan yang terintegrasi mengenai Kebijakan dan Penyaluran Dana Desa. Hal ini tentu mendukung adanya transparansi yang lebih tinggi dan diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat terkait pengawalan Dana Desa. Situs ini akan menyimpan seluruh dokumen dari mulai Peraturan, pelaporan sampai realisas Dana Desa didalam satu situs saja. Sinkronisasi dengan SisKeuDes membuat DataDesa.co.id menjadi wadah yang lebih efektif dan efisien untuk pertanggungjawaban kebijakan Dana Desa kepada publik.

Hal yang unik lainnya menunjukkan bahwa Laporan dan Dokumen Desa yang didapatkan dari pemerintah terkait tersedia dalam bentuk Infografis yang atraktif. Hal ini tentu menjadi awalan untuk mengajak seluruh desa dan masyarakat untuk mengawal Dana Desa ke arah yang lebih efektif.

Daftar Pustaka

Annisya, Mafiana. *Pendeteksian Kecurang Laporan Keuangan Menggunakan Fraud Diamond*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2016, Hal. 72 – 89

Diakses melalui http://www.bnm.gov.my/microsites/fraudalert/01_what.htm

Diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemanfaatan-dana-desa-yang-efektif-solusi-tingkatkan-kesejahteraan-rakyat.html>

Diakses melalui <https://tirto.id/rp302-miliar-dana-desa-dikorupsi-c9T9>

Diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>

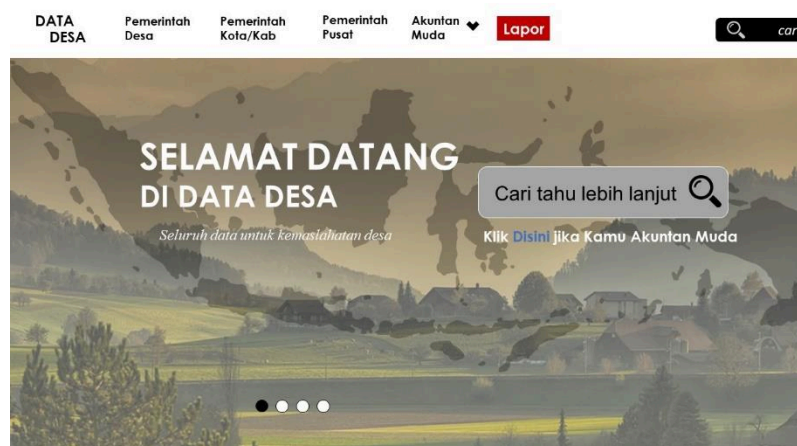
Gonschorek, Gerrit J. dan Günther G. Schulze. 2018. *Continuity or Change? Indonesia's Intergovernmental Fiscal Transfer System under Jokowi*. ProQuest : Journal of Southeast Asian Economies Vol. 35, No. 2 (2018), pp. 143–64

Hidayati, Erni. 2016. *Fungsi Lurah Selaku Pemimpin dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Hijau Bersih dan Sehat (HBS) Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda*. Kalimantan : eJournal Administrasi Negara

Indonesia Corruption Watch. 2018. *Outlook Dana Desa 2018: Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*.

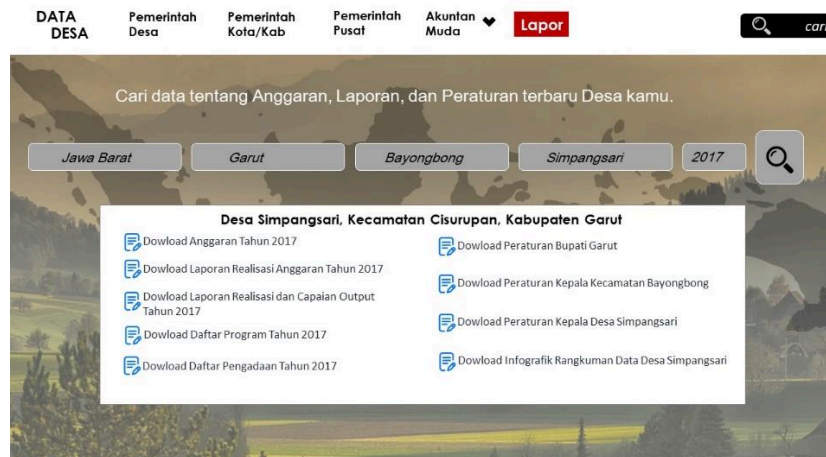
Lampiran



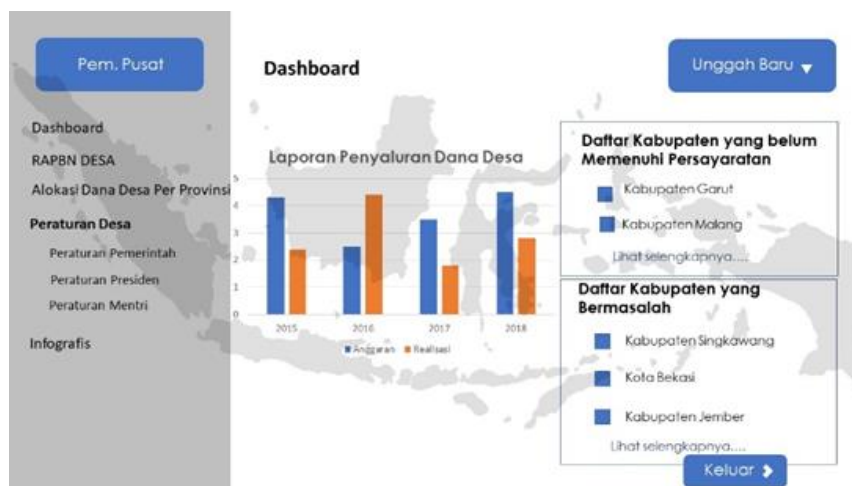
Lampiran 1.- Tampilan Depan



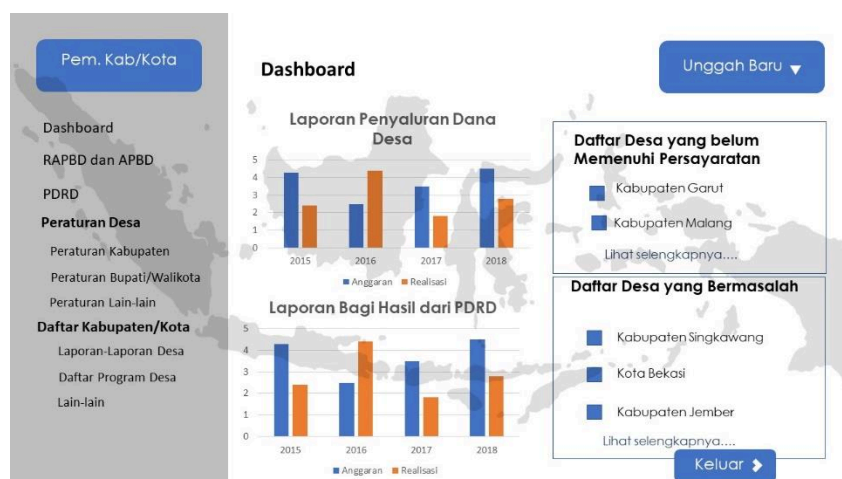
Lampiran 2- Tampilan Menu Pemerintah Desa



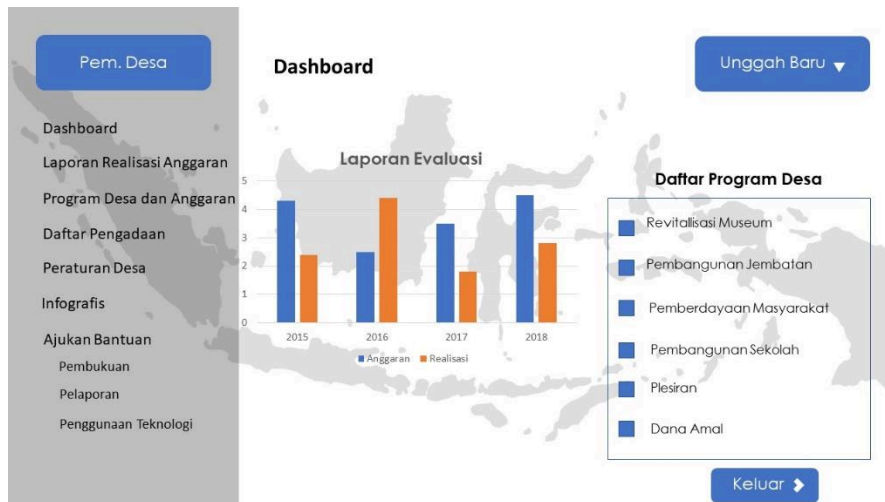
Lampiran 3- Tampilan Informasi Data Desa



Lampiran 4- Dashboard Pemerintah Pusat



Lampiran 5- Dashboard Pemerintah Daerah Kabupaten Kota



Lampiran 6- Dashboard Pemerintah Desa

Dashboard

Unggah Baru ▼

Daftar Akuntan Muda yang Bersedia untuk membantu

No	Nama Akuntan Muda	Asal Universitas	Curriculum Vitae
1	Fulan A	PPM	Download File
2	Fulan B	UI	Download File
3	Fulan C	Trisakti	Download File
4	Fulan D	UMN	Download File
5	Fulan E	UPH	Download File

Keluar ➤

Lampiran 7- Dashboard Mengajukan Bantuan

Create an Account Sign in

Nama Depan: Nama Belakang

Email

Password

No Telepon

Asal Universitas

Unggah CV **Browse File**

Dengan membuat akun, kamu setuju dengan ketentuan dan kondisi situs ini dan kebijakan privasi sebagai Akuntan Muda.

BUAT ➤

Lampiran 8-Pembuatan Akun Akuntan Muda



Lampiran 9.0- Dashboard Akuntan Muda



Lampiran 9.1- Dashboard Akuntan Muda